

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Marlang dan Rina Masyana. (2011). *Hukum Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya*, Aspublishing Makassar, Mitra Wacana Media.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- _____ (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2023). *Laporan Kinerja Tahun 2023*.
- Dhina Puspitawati. (2017). *Hukum laut internasional*, kencana-prenada media group, Jakarta.
- Gustav Radbruch. (2006). *“Legal Philosophy.”* Oxford University Press.
- Heryandi. (2014). *“Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan.”* Bandar Lampung: BP. *Justice Publisher*.
- Huda. N. (2015). *Ilmu Negara*. Jakarta, Rajawali Press, hlm. 49.
- I Made Pasek Dlantha. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenda Media Group.
- Jeremy Bentham. (1948). *“An Introduction to the principles of Morals and Legislation.”* Hafner Press.
- Johnny Ibrahim. (2010). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation).
- Marhaeni Ria Siombo. (2010). *“Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional.”* Gramedia Pustaka Utama.
- Miruddin dan H Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- R.R Churchill, *et al.* (1999) Lowe, *The Law of the Sea, 3rd ed. University Press: Manchester*.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soejono Soekanto, *et. al.* (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI press, Jakarta.
- _____. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- S. Nasution. (1996) *Metode Naturalistik Kualitatif* Bandung: Tarsinto.
- Stephen D. Krasner (1983). "International Regimes". Ithaca: Cornell University Press.
- Syahmin AK. (1992). "Hukum Internasional Publik: dalam kerangka studi analitis." (bandung; binacipta).
- Sofyan. A. (2012). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Rangkang Education.
- Victor Nikijuluw. (2002). "Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan." Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Yoshifumi Tanaka. (2012). *The International Law of the Sea*. Law Cambridge university press.

B. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi

- Adia Candra. (2019). "Analisis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus Konflik Normatif Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Aida, M. (2014). "Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia". FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 1–21.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.67>.

- Athyyah Amirah Rismi, (2024). "Implementasi Hukum Internasional mengenai *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia." Fakultas Hukum: Universitas Muslim Indonesia.
- Asiyah Jamilah, *et, al.*, (2020). "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Vol. 5 Issue 1.
- Dendy Mahabrur. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Ediwarman. (2011) *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Fahrul Azmi Lubis, *et, al.*, (2025). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Belawan)." *Jurnal kajian hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Vol. 6 No.1.
- Hardijan Rusli. (2006). "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3.
- Humaira Afdini. (2021). "Upaya Hukum dalam Meminimalisir Illegal Fishing terkait Kawasan ZEE Indonesia.", vol. 4 no. 2, *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- lin Karita Sakharina, *et. al.* (2020). *Sinking or Not? An Indonesian Approach to Prevent the rise of Sea Levels due to Global Warming*. ASEAN International Law. Vol. 13/No.1.
- Indonesia Ocean Justice Initiative, 2024. Deteksi Dan Analisis Dugaan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Perairan Dan Yurisdiksi Indonesia.
- Jhon Mayer H. Siahaan. (2017). "Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (Iluu-Fishing) Di Perairan Provinsi Riau Tahun 2014-2016," *Jom Fisip* 4, no. 1: 6.
- Jimly Asshiddiqie. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". *Journal Of Law*.
- Medendehe, R. J. (2021). "Penanganan Pelanggaran Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna". *Lex Et Societatis*, 9(1), 13–20. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32050>
- Muchsin. (2003). "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Parihutantua Simarmata. (2017). "Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Hak Indonesia menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983." *Jurnal Ilmiah Indonesia, Akademi Maritim Cirebon*. Vol. 2, No 2.

- Putri, M. N. (2021). "Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(01), 1. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2418>.
- R. La Porta, (2000). "Investor Protection and Corporate governance", *Jurnal Of financial Economics*.
- Siti Munawaroh, (2019), '*Penerapan Sanksi Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)*'. Fakultas Hukum. Universitas Islam Darul `Ulum, Jawa Timur.
- Stephen D. Krasner. (1982). "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables," *International Organization*, Vol. 36, No. 2.
- Taufan, N. *et al.*, (2014). "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia sebagai Negara Maritim. *Jurnal Selat*, 2(1).
- Usmawadi Amir. (2013) "Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case). Vol. 12.
- Yulia Wiliawati, *et al.*, (2022). "Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol 2 No 2.

C. Perundang-Undangan

UUD NRI 1945.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

United Nations on the law of the Sea 1982

UU. No. 17 Tahun 1985 tentang *Ratifikasi UNCLOS 1982*.

UUD NRI 1945.

UU. No. 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif*.

UU. No. 17 Tahun 1985 tentang *Ratifikasi UNCLOS 1982*.

UU. No. 32 Tahun 2004 tentang *Kelautan*.

UU. No. 45 Tahun 2009 tentang *perubahan atas UU. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan*.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

D. Interconnected Network (Internet)

Anonim. (2003). *"Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators"*, Australian Antarctic Magazine 5 Winter.

Andina Librianty. "Menteri Trenggono Ungkap 12 Modus Illegal Fishing di Indonesia", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4464762/menteri-trenggono-ungkap-12-modus-illegal-fishing-di-indonesia>

Dewan Kelautan Indonesia. (2008). Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal.

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2024/PN.Tpg.

Indonesia Ocean Justice. (2022). *Ancaman Keamanan Laut dan IUUF di Indonesia Februari 2022*.

Muhammad Idris. (2020). "Mengenal Apa Itu ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut", <https://money.kompas.com/read/2020/09/15/071705426/mengenal-apa-itu-zee-atau-zona-ekonomi-eksklusif-di-laut?page=all>.

Muhammad Tasrih. (2014). "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEE Indonesia Oleh Negara Tak Berpantai Menurut UNCLOS 1982," Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2: 3.

Mongabay. (2023). *Kapal Illegal Fishing Filipina ditangkap, Gunakan Modus Baru*.

Sucifundo. (2011). *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.

Wikipedia. "Laut Natuna", diakses pada tanggal 8 september 2025. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut_Natuna.